

## ABSTRAK

### STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN GUBURNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Oleh

**Mirani Simanungkalit**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak menyisakan hal yang demokratis, masih banyak temuan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Lampung mendata total pelanggaran yang terjadi berjumlah 152. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan strategi yang digunakan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Lampung dalam pelaksanaan pengawasan sudah cukup baik dalam menempatkan keempat strategi. Analisis pelaksanaan berdasarkan pertama, *Planning* dari analisis ini Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan, wujud pencegahan yang dilakukan yaitu membentuk kelompok kerja Kampanye dan DPT. Kedua, *Organizing* dari analisis ini pengelompokan kegiatan melibatkan beberapa divisi diantaranya Divisi Penindak Pelanggaran, Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga dan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta melibatkan *stakeholders* Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Media massa, cetak dan elektronik. Ketiga, *Actuating*, dari analisis ini yaitu pelaksanaan pilkada yang dilakukan Bawaslu berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu mampu melibatkan *stakeholders* dalam mengawasi Pemilu Pilgub. Keempat, *Controlling*, dari analisis ini yaitu setelah mengkaji, Bawaslu mampu menemukan berbagai macam pelanggaran pada proses Pengawasan yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya pelanggaran Administrasi, Pidana dan ASN. Bawaslu menindak temuan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum pada Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2017, dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu melakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan alat bukti hingga pemberian rekomendasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan, Bawaslu belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemilu yang demokratis namun cukup baik dan mampu meminimalisasi terjadinya temuan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan sudah berdasarkan dengan Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Strategi Pengawasan, Penindakan, Pemilihan Gubernur

## ABSTRACT

### THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN SUPERVISING THE STAGE OF THE ELECTION OF THE LAMPUNG GOVERNOR 2018

By

**Mirani Simanungkalit**

The holding of local leaders election does not leave a democratic thing, there are still many findings that occur, Bawaslu of Lampung Province recorded the total violations that occurred amounted to 152. The purpose of this study is to find out and analyze the stages of strategy used by Bawaslu in preventing and prosecuting violations. This paper uses the qualitative research method, as well as the technique of collecting data with interviews. The results of the study indicate that Bawaslu in implementing supervision is good enough in placing all four strategies. The implementation analysis based on the first is *Planning*, from this analysis, Bawaslu prioritizes prevention, by forming a Campaign working group and DPT. The second, *Organizing*, in this analysis, the grouping of activities involves several divisions including the Division of Violation, Supervision, Public Relations and Relations between Institutions and Organizations, and Human Resources. The third, *Actuating*, from this analysis it is known that the implementation of local leaders election conducted by Bawaslu is in accordance with PKPU Number 2 Year 2018. The implementation of supervision of Bawaslu involved the stakeholders in supervising the election. The fourth, *Controlling*, from this analysis is after reviewing, Bawaslu was able to find various kinds of violations in the Supervision process carried out at the Election of Lampung Governor 2018. Violations found included violations of Administration, Criminal and ASN. Bawaslu took action against the findings of violations in accordance with those stated in the Republic of Indonesia National Supervisory Agency Number 7 of 2017, in taking action the violations Bawaslu did a few stages started from fulfilling evidences until giving recommendation. Based on this, the researchers concluded, Bawaslu can not completely make a democratic election but good enough in minimizing the occurrence of violations. The supervision had been done based on the Law.

**Keywords: Monitoring Strategy, Enforcement, Governor Election**